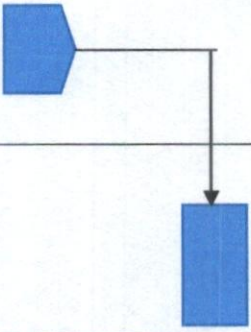


 PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	Nomor SOP	067/4617
	Tgl Pembuatan	10 Juni 2021
	Tgl Revisi	30 oktober 2025
	Tgl Efektif	30 oktober 2025
	Disahkan Oleh	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak   Yudi Santosa, S E , M Si , Akt Pembina Tingkat I NIP. 197806192003121007
SOP FASILITASI SENGKETA INFORMASI PUBLIK		
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA	
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, 3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, 4. Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak, 5. Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2024 tentang Standar Layanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Daerah, 6. Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2025 tentang Sistem Kerja Untuk Penyederhanaan Birokasi.	1. Memiliki kemampuan Tim Fasilitasi Sengketa Informasi, 2. Mengetahui prosedur pengajuan penyelesaian sengketa informasi	
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN	
1. SOP DIP 2. SOP Penanganan Keberatan Informasi Publik, 3. SOP Uji Konsekuensi Informasi Publik.	1. Lembar Kerja/Rencana Kerja Anggaran, 2. KAK, 3. Komputer/Printer/Scanner, 4. Jaringan Internet.	
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN	
Apabila penanganan fasilitasi sengketa informasi publik ini tidak dilaksanakan sesuai dengan prosedur, maka akan memperlambat proses penyelesaian sengketa	Disimpan dalam bentuk softcopy dan hardcopy	

SOP FASILITASI SENGKETA INFORMASI PUBLIK

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana					Pendukung		Keterangan
		Pemohon Informasi	PPID Kabupaten/PPID Pelaksana	Atasan PPID	Komisi Informasi	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Setiap pemohon informasi dapat mengajukan sengketa informasi publik secara tertulis kepada Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah apabila jawaban permohonan keberatan atas informasi publik yang diinginkan					Kelengkapan administrasi permohonan sengketa informasi publik ditetapkan Komisi Informasi provinsi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	Pada hari jam kerja	Berkas permohonan sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi	
2	Komisi Informasi Provinsi akan memberitahu secara tertulis kepada atasan PPID Kabupaten tentang adanya sengketa informasi publik					Surat resmi KI Provinsi Jateng tentang adanya sengketa IP	Pada hari jam kerja	Surat resmi KI Provinsi Jawa Tengah tentang adanya sengketa IP	
3	Atasan PPID memerintahkan PPID Kabupaten untuk membentuk Tim Fasilitasi Sengketa Informasi menetapkan Tim fasilitasi sengketa informasi untuk mengayakan penyelesaian sengketa informasi yang dibentuk oleh PPID Kabupaten			 		Surat resmi KI provinsi Jateng tentang adanya pengajuan sengketa IP	Pada hari dan jam kerja	Tanggapan tertulis dari atasan PPID perihal Informasi yang disengketakan	

4.	PPID Kabupaten membentuk Tim fasilitasi sengketa informasi diketuai oleh PPID Kabupaten dan beranggotakan PPID Pelaksana terkait, pejabat yang menangani bidang hukum, pejabat fungsional, serta JFU yang sesuai dengan kebutuhan				Surat resmi KI provinsi Jateng tentang adanya pengajuan sengketa IP	Diajukan dalam waktu paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah hari kerja setelah diterimanya arahan tertulis dari Atasan PPID	SK PPID Kabupaten tentang pembentukan Tim Fasilitasi Sengketa Informasi Publik	
5.	Upaya penyelesaian fasilitasi sengketa publik oleh tim fasilitasi informasi publik di Komisi Informasi Provinsi				1. FC KTP semua anggota tim fasilitasi sengketa IP 2. Surat kuasa Tim fasilitasi sengketa IP dan atasan PPID 3. Bahan/dokumen yang berhubungan dengan sengketa IP	Waktu ditentukan oleh KI Provinsi Jateng	Resume upaya penyelesaian sengketa informasi publik	
6.	Tim fasilitasi Sengketa Informasi Publik bersama PPID Kabupaten melaporkan proses penanganan sengketa Informasi Publik kepada Atasan PPID				Resume upaya penyelesaian sengketa informasi publik	Dilakukan pada setiap tahapan dalam upaya penyelesaian sengketa informasi publik di KI Provinsi	Dokumen resume upaya penyelesaian sengketa informasi publik	

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan,
Pendapatan dan Aset Daerah
Kabupaten Demak

